

KONTRIBUSI DELAPAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TERHADAP PENCAPAIAN PRESTASI BELAJAR

CONTRIBUTION OF EIGHT NATIONAL EDUCATION STANDARDS TOWARDS LEARNING ACHIEVEMENT

Sabar Budi Raharjo

Pusat Penelitian Kebijakan, Balitbang Kemdikbud
Lantai 19, Gedung E JI Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta
e-mail: raharjo2sbr@Yahoo.co.id

Naskah diterima tanggal: 21/11/2014; Dikembalikan untuk revisi tanggal: 25/11/2014; Disetujui tanggal: 3/12/2014

Abstract: *National education standards is a means to ensure the quality of educational services. School administrators must fulfill minimum standards in helping students to achieve learning target. The purpose of this study was to determine the achievement of national education standards and the extent to which they contribute to eight national education standards towards the learning achievement of high school students. The research method is a survey. The results showed that first, among the achievement of eight national education standards, educational facilities and infrastructures standards, process standards competency standards and education professional standards were considered low. Second, the eight national education standards contribute less significant to student national examination score. This means that successful learning achievement is determined by other factors, both internal and external, such as motivation, interest, parental background, school environment. From the eight standards, teacher and education personnel standard give significant influence to national students exam results. The first conclusions is that, four standards with below average accreditation credits are educational facilities and infrastructures standards, process standards, competency standards, and education professional standards. Secondly, the contribution of eight national standards of education is still relatively less and other factors are needed in order to improve the students' learning achievement.*

Keywords: *national education standards, learning achievement, education quality*

Abstrak: *Standar nasional pendidikan merupakan sarana untuk menjamin mutu layanan pendidikan. Dalam memberikan layanan pendidikan pengelola sekolah berusaha memberikan standar minimal kepada peserta didik dalam mencapai prestasi belajar. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui ketercapaian standar nasional pendidikan dan sebesarapa besar kontribusi delapan standar nasional pendidikan terhadap pencapaian prestasi belajar siswa SMA. Metode penelitian adalah survei. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) dari delapan standar yang ada, standar yang masih rendah adalah standar sarana-prasarana, standar proses, standar kompetensi, dan standar tenaga pendidik dan kependidikan; 2) Delapan standar nasional pendidikan terhadap prestasi belajar (UN) tidak terlalu signifikan. Hal ini berarti bahwa keberhasilan prestasi belajar ditentukan oleh faktor lain baik internal maupun eksternal seperti motivasi, minat, latar belakang orang tua, dan lingkungan sekolah. Dari 8 standar tersebut, standar yang memiliki pengaruh signifikan terhadap UN adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan (PTK). Simpulan dari penelitian ini: 1) empat standar yang masih rendah perolehan angka akreditasi yaitu standar sarana-prasarana, standar proses, standar kompetensi dan, standar tenaga pendidik dan kependidikan masih rendah; 2) kontribusi delapan standar masih relatif kecil dan perlu memperhatikan faktor lain di luar standar dalam perbaikan mutu prestasi belajar.*

Kata kunci: *standar nasional pendidikan, prestasi belajar, mutu pendidikan*

Pendahuluan

Pendidikan merupakan investasi masa depan bagi seseorang atau suatu bangsa yang akan meraih suatu kehidupan lebih sejahtera. Dengan pendidikan yang lebih baik maka suatu bangsa akan menuju suatu perubahan tatanan kehidupan yang rapi dan tertib untuk mencapai peradaban modern. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan yang berkualitas atau bermutu. Artinya, bahwa dalam menyelenggarakan pendidikan diperlukan suatu proses pendidikan yang bermutu.

Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan beberapa komponen penyelenggaraan yang berkualitas mulai dari peraturan penyelenggaraan, sumber daya pendidikan dan tenaga pendidikan, kurikulum, sarana-prasarana serta sistem penilaian yang berkualitas. Tercapainya sumber daya yang berkualitas menjadi tanggung jawab pemerintah bersama masyarakat.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20, Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional pada Pasal 3 dinyatakan bahwa, "pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Departemen Pendidikan Nasional, 2003). Dalam konteks pendidikan nasional diperlukan standar yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan. Langkah-langkah strategis dapat dicapai melalui berbagai kegiatan di dalam proses pendidikan. Apabila tidak ada patokan atau *yardstick* yang dijadikan pedoman sudah barang tentu akan terjadi kekacauan dalam pendidikan karena tidak mempunyai arah. Pernyataan mengenai perlunya standar pendidikan nasional adalah; a) standar pendidikan nasional merupakan tuntutan politik, b) standar pendidikan nasional merupakan tuntutan globalisasi, c) standar pendidikan nasional merupakan tuntutan dari kemajuan (Tilaar, 2006). Lebih lanjut dikemukakan bahwa fungsi standar nasional pendidikan adalah a) mengukur kualitas

pendidikan, b) pemetaan masalah pendidikan, c) penyusunan strategi dan rencana pengembangan sesudah diperoleh data dari evaluasi belajar secara nasional seperti ujian nasional.

Terkait dengan Standar Nasional Pendidikan, dikemukakan oleh Sudrajat (2010), bahwa Standar Nasional Pendidikan memiliki fungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu, dan bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Artinya, standar pendidikan merupakan fondasi dalam membangun pendidikan Indonesia untuk mencapai mutu pendidikan Indonesia.

Dengan kualitas pendidikan yang dihasilkan maka diharapkan kualitas manusia bangsa Indonesia meningkat. Kualitas manusia Indonesia dapat diukur berdasarkan *Human Development Index* atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). *Human Development Index Indonesia* dan beberapa Negara tetangga yang dikeluarkan oleh *United Nations Development Programme* (2013) menunjukkan, bahwa posisi Indonesia tahun 2013 berada pada peringkat 121 dari 185 negara di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, dan Philipina.

Kebijakan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam mengelola pendidikan adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Departemen Pendidikan Nasional, 2003). Pasal 4 dalam PP tersebut menyatakan, bahwa standar nasional pendidikan merupakan sarana untuk menjamin mutu pelayanan pendidikan. Standar pendidikan meliputi standar isi, proses, ketenagaan, sarana dan prasarana, pengelolaan, evaluasi, pembiayaan, dan kompetensi lulusan. Dengan adanya standar nasional tersebut maka arah peningkatan mutu pendidikan Indonesia menjadi lebih jelas. Bila setiap satuan pendidikan telah mencapai atau melebihi standar nasional pendidikan tersebut, maka diharapkan mutu pendidikan akan tercapai.

Seperti telah dikemukakan bahwa, pengelolaan sekolah di Indonesia diarahkan untuk mencapai standar minimal, seperti yang tertera

dalam standar nasional pendidikan. Berkenaan dengan hal tersebut, maka pada kesempatan ini dilakukan kajian tentang kontribusi standar nasional pendidikan terhadap ketercapaian prestasi belajar siswa pada sekolah jenjang pendidikan menengah (SMA). Oleh karena itu, perumusan masalah yaitu seberapa besar ketercapaian standar nasional pendidikan dan berapa besar kontribusi delapan standar nasional pendidikan terhadap pencapaian prestasi belajar siswa SMA? Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar ketercapaian standar nasional pendidikan dan kontribusi delapan standar nasional pendidikan terhadap pencapaian prestasi belajar siswa SMA.

Kajian Literatur

Standar Nasional Pendidikan

Dalam manajemen, kriteria ketercapaian tujuan adalah efektif dan efisien. Dalam hal efektivitas dan efisiensi ini Drucker dalam Rue & Byars (2000) menyatakan *"Effectiveness is the foundation of success; efficiency, is concerned with doing things right. Effectiveness is doing the right things"*. Efektivitas merupakan landasan untuk mencapai sukses, sehingga hanya tujuan dan pekerjaan yang benar (*do right things*) yang dilaksanakan. Dengan kata lain, efektivitas adalah mengerjakan pekerjaan dengan benar, sedangkan efisiensi berkenaan dengan bagaimana cara mengerjakan yang benar (*do things right*). Bila dalam organisasi melakukan pekerjaan dengan benar (sesuai rencana), maka akan muncul efektivitas, dan bila cara yang digunakan untuk mengerjakan pekerjaan yang benar itu tepat, maka akan menghasilkan efisiensi.

Selanjutnya, Robbins dan Coulter (2009), menyatakan bahwa, *"effectively is often describe as doing the right things, that is, doing those work activities that will help the organization reach its goal"*, sedangkan *"Efficiency refers to getting the most output from the least amount of inputs", it's often doing things right*. Dengan demikian, efektivitas lebih menekankan pada pencapaian tujuan, baik secara eksplisit maupun implisit. Efektivitas juga sering diartikan mengerjakan pekerjaan yang benar, yaitu mengerjakan pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi, sedangkan efisiensi lebih menekankan pada

upaya mencapai *output*/hasil yang maksimal dengan input yang minimal. Untuk mencapai hasil maksimal dengan input yang minimal maka harus terjadi *doing things right*, mengerjakan pekerjaan dengan cara yang benar.

Apabila dikaitkan dengan ketercapaian delapan standar nasional pendidikan, maka sekolah harus dapat menggunakan sumber daya yang tersedia dalam memenuhi standar yang disyaratkan sesuai standar nasional pendidikan. Dalam PP 19/2005, dinyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar nasional pendidikan dimaksudkan untuk memacu pengelola, penyelenggara, dan satuan pendidikan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu. Selain itu, standar nasional pendidikan juga dimaksudkan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan meliputi delapan standar yaitu, standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.

Berdasarkan uraian di atas, ketercapaian standar pendidikan nasional yang dimaksud adalah tercapainya delapan standar pendidikan nasional pada jenjang pendidikan menengah.

Prestasi Akademik

Kegiatan belajar mengajar prestasi akademik merupakan cermin dari upaya yang dilakukan sekolah dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Prestasi akademik yang dihasilkan suatu sekolah melibatkan beberapa komponen yaitu guru, kepala sekolah, dan sarana-prasarana sekolah yang menunjang kegiatan belajar mengajar. Prestasi akademik merupakan hasil penilaian yang dilakukan oleh guru sebagai umpan balik dari hasil proses belajar mengajar. Penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh guru dilakukan secara berkesinambungan untuk memahami proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester,

ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Penilaian belajar oleh pemerintah bertujuan untuk penilaian pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional (Mulyasa, 2010).

Selanjutnya, dikemukakan ujian nasional (UN) dilakukan secara obyektif, berkeadilan, dan akuntabel, serta diadakan sebanyak-banyaknya satu kali, dan sebanyak-banyaknya dua kali dalam satu tahun pelajaran. Hasil UN dijadikan sebagai salah satu pertimbangan untuk: 1) pemetaan mutu program dan satuan pendidikan; 2) dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya; 3) penentuan kelulusan peserta didik; 4) pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Setiap peserta didik wajib mengikuti satu kali ujian nasional tanpa dipungut biaya, dan berhak mengulanginya sepanjang belum dinyatakan lulus dari satuan pendidikan. Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah menyelesaikan seluruh program pembelajaran dan memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh kelompok mata pelajaran. Lulus ujian sekolah atau madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, serta lulus ujian nasional. Kelulusan peserta didik ditetapkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan kriteria yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan ditetapkan dengan peraturan menteri.

Secara umum, penilaian merupakan proses mengumpulkan informasi untuk mengetahui pencapaian belajar peserta didik (Mardapi, 2005). Dengan demikian penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar siswa yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Penilaian proses dan hasil belajar bertujuan untuk

menentukan tingkat ketercapaian tujuan pendidikan dan atau tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum atau perangkat perencanaan kegiatan pembelajaran lainnya. Arikunto (2010) mengemukakan bahwa penilaian dilakukan bertujuan: 1) merangsang aktivitas siswa; 2) menemukan penyebab kemajuan atau kegagalan siswa, guru, maupun proses pembelajaran itu sendiri; 3) memberi bimbingan yang sesuai kepada setiap siswa; 4) memberi laporan tentang kemajuan atau perkembangan siswa kepada orang tua dan lembaga pendidikan terkait; dan 5) sebagai *feedback* program atau kurikulum pendidikan yang sedang berlaku. Mengingat pentingnya tujuan penilaian dilakukan, maka seorang guru diharapkan senantiasa melakukan penilaian dengan berbagai model yang variatif, sehingga siswa sebagai sasaran penilaian merasakan manfaat dan kebermaknaan dari semua penilaian tersebut. Berdasarkan hasil penilaian yang komprehensif terhadap tiga aspek terhadap siswa maka kemajuan belajar siswa dan tingkat efisiensi mengajar guru dapat diketahui. Dengan demikian, rancangan pembelajaran yang disusun pada proses pembelajaran berikutnya dapat disempurnakan dengan melihat kekurangan yang terjadi.

Dalam kegiatan belajar mengajar, dikenal dengan istilah tes yang memiliki tiga fungsi yaitu 1) tes dapat berfungsi sebagai alat untuk mengukur prestasi belajar siswa, 2) tes berfungsi sebagai motivator dalam pembelajaran, dan 3) tes dapat berfungsi untuk perbaikan kualitas pembelajaran, Djaali & Ramli (2000). Oleh karena itu, hasil penilaian tersebut dapat digunakan dalam memberi umpan balik (*feedback*) berhasil atau gagalnya suatu kegiatan pembelajaran atau proses pendidikan.

Untuk mendukung penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang berbasis kompetensi maka perlu dikembangkan model evaluasi program pembelajaran yang lebih menyeluruh sehingga dapat digunakan oleh pimpinan sekolah atau kepala sekolah untuk mengevaluasi program pembelajaran yang telah disusun dan dilaksanakan oleh guru. Hasil evaluasi program ini harus dijadikan landasan untuk menerapkan kebijakan berikutnya secara sistemis dan sistematis. Ada beberapa sumber

yang dapat dijadikan acuan untuk menilai produk pembelajaran. Menurut Savage & Armstrong, dalam Widyoko (2007) untuk menilai hasil pembelajaran dapat dilakukan melalui: a) penilaian secara informal meliputi observasi guru, diskusi guru dengan siswa, kliping artikel surat kabar, dan teknik-teknik informasi lainnya; b) penilaian secara formal meliputi *rating scale*, *checklist*, *attitude inventories*, tes isian, tes pilihan ganda, dan tes melengkapi. Penilaian pendidikan sesuai Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 pada prinsipnya adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik (Departemen Pendidikan Nasional, 2007).

Penilaian dikatakan efektif jika memiliki prosedur yang baku dalam implementasinya. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh Pemerintah. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik dan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud di atas diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebuah penilaian memiliki ukuran keberhasilan atau efektivitas, yang dikenal dengan istilah kriteria. Suatu model evaluasi dikatakan efektif apabila memiliki kriteria-kriteria efektivitas suatu model. Dalam penilaian, istilah kriteria sering dikenal dengan istilah tolok ukur atau standar. Menurut Arikunto (2010), kriteria merupakan sesuatu yang digunakan sebagai patokan atau batas minimal untuk sesuatu yang diukur. Kandak dan Egen dalam Burden & Bayrd (1999) mengatakan bahwa: *effective assesment in the real world of the classroom teacher has three interrelated feature: It must be valid, systematic, and practical. To be valuable while remaining professionally sound, the assesment system must possess all the three feature*. Efektivitas suatu penilaian harus memenuhi tiga kriteria utama, yakni valid, sistematis, dan praktis. *Valid* maksudnya suatu model penilaian mampu menilai apa yang akan dinilai. Sistematis maksudnya bahwa pelaksanaan

penilaian dilaksanakan secara terencana dan teratur. *Praktis* maksudnya model penilaian tersebut mudah diimplementasikan.

Dengan demikian, prestasi belajar di sini adalah prestasi belajar akademik yang dilakukan penilaiannya oleh pemerintah sebagai penilai pendidikan secara eksternal yang berbentuk UN.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan bagian dari "Kajian Ketercapaian Standar Nasional Pendidikan Jenjang Pendidikan Menengah". Metode kajian ini menggunakan metode survei dengan pengambilan sampel berdasarkan pada data hasil UN. Instrumen utama yang digunakan adalah kuesioner untuk mengumpulkan data tingkat ketersediaan sumber daya pendidikan berdasarkan kriteria delapan standar nasional pendidikan. Mengukur sumbangan dari masing-masing indikator kriteria delapan standar nasional pendidikan terhadap prestasi siswa dengan menggunakan indikator perolehan UN. Oleh karena itu, unit analisis adalah satuan pendidikan berdasarkan data UN yang akan dikorelasikan dengan indikator agregat pada tingkat satuan pendidikan.

Berdasarkan unit analisis tersebut, sampling dipilih secara *stratified random sampling* berdasarkan nilai UN pada satuan pendidikan di kabupaten/kota. Setiap kabupaten/kota distratifikasi berdasarkan pada hasil UN yang dibagi dalam kuantil (K1, K2, K3, K4, dan K5).

Berdasarkan hasil UN SMA seluruh Indonesia pada tahun 2012, nilai UN yaitu K1 ($\leq 7,05$), K2 (7,0501-7,6700), K3 (7,6701- 8,0900), K4 (8,0901- 8,3800) dan K5 ($\geq 8,3800$). Sesuai dengan pemilihan sampel penelitian maka terdapat di 23 provinsi, 45 kabupaten/Kota, dan sebanyak 210 sekolah sampel. Penelitian ini dilakukan pada bulan September sampai Oktober 2013. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Data yang diperoleh dilakukan analisis untuk melihat ketercapaian standar nasional pendidikan dan perolehan UN sekolah.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Karakteristik sekolah

Penelitian ini dilaksanakan di 23 provinsi dan 45 kabupaten/kota sebagai sampel penelitian.

Sekolah yang diambil sebagai sampel adalah sebanyak 210 sekolah dengan perincian 157 sekolah negeri dan 53 sekolah swasta. Sampel ini menunjukkan bahwa sekitar 67% wilayah provinsi masuk dalam sampel penelitian ini. Dengan kondisi seperti ini representasi responden memadai untuk melihat beberapa fenomena yang dihadapi yang berkenaan dengan ketercapaian standar nasional pendidikan.

Sekolah terdiri atas sekolah eks Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), Sekolah Standar Nasional (SSN) dan reguler, maka apabila dikelompokkan dalam 5 kuantil persebaran adalah berikut; kuantil 1 (57%) sekolah-sekolah berstatus reguler, kuantil 2 (48%) sekolah-sekolah berstatus SSN, kuantil 3 (61%) sekolah-sekolah berstatus SSN, kuantil 4 (41%) sekolah-sekolah berstatus SSN, dan kuantil 5 (43%) adalah sekolah-sekolah berstatus eks RSBI. Hal ini menunjukkan bahwa, pada kelompok kuantil 5 sebagian besar sekolah berstatus eks RSBI. Artinya bahwa sekolah yang berada pada kuantil 5 dengan capaian UN tinggi dapat dinyatakan wajar mencapai prestasi tinggi karena di sekolah eks RSBI tersebut sebagian besar telah mencapai delapan standar nasional pendidikan. Dengan demikian, untuk mencapai suatu prestasi di suatu sekolah, maka faktor standar nasional pendidikan menjadi suatu keniscayaan harus dipenuhi. Standar Nasional Pendidikan sebenarnya merupakan standar minimal yang harus dipenuhi sekolah dalam memberikan layanan pendidikan. Namun, standar nasional tersebut juga menjadi dasar dalam mengembangkan berbagai prestasi bagi warga

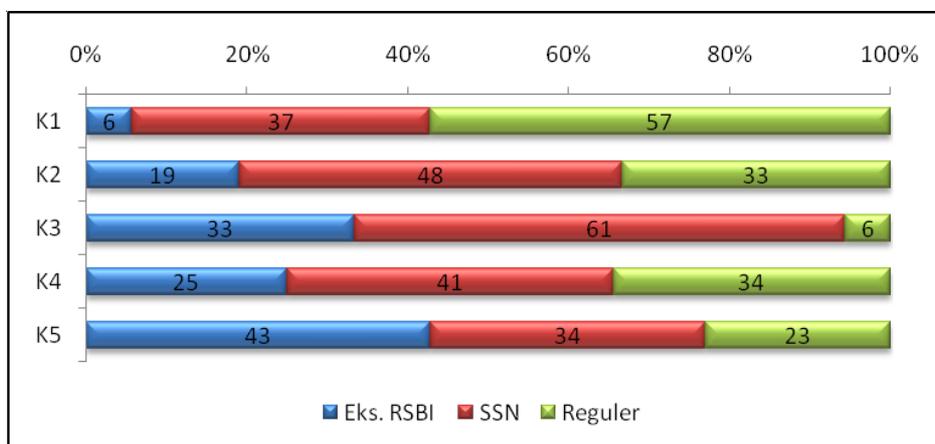
sekolah mulai dari siswa, guru, dan kepala sekolah secara bersama-sama untuk menjadikan sekolah tersebut berprestasi secara mandiri. Grafik 1 menunjukkan persentase sekolah dalam kategori kuantil.

Capaian Standar Nasional Pendidikan

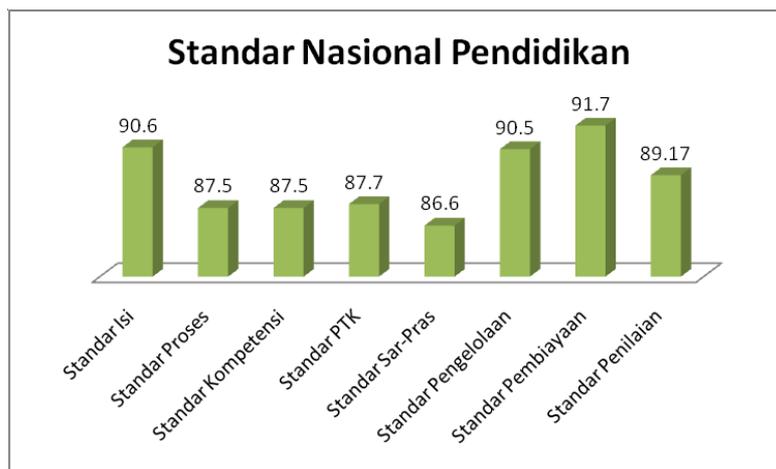
Apabila dilihat dari hasil akreditasi yang dilakukan Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah (BAN-SM) dengan kategori A, B, dan C terlihat dalam grafik 2, bahwa standar yang masih rendah yaitu standar sarana dan prasarana, standar proses, standar kompetensi, dan standar PTK.

Data tersebut menggambarkan, bahwa sebagian besar sekolah dalam wilayah sampel standar sarana prasarana masih belum tercukupi secara maksimal bila dibandingkan dengan standar lainnya. Standar lain yang juga masih rendah adalah standar proses, kompetensi, dan PTK. Dari empat standar yang rendah tersebut yang perlu mendapat perhatian besar dalam peningkatan standar adalah standar PTK. Karena standar PTK menjadi kunci untuk meningkatkan standar lainnya seperti standar proses, standar isi, dan standar kompetensi. Terkait dengan standar PTK bagi guru yang penting adalah dimilikinya 4 kompetensi guru, yaitu kompetensi profesionalisme, pedagogi, kepribadian, dan sosial. Penguasaan empat kompetensi tersebut memberikan jaminan bagi peningkatan standar proses, standar isi, dan standar kompetensi.

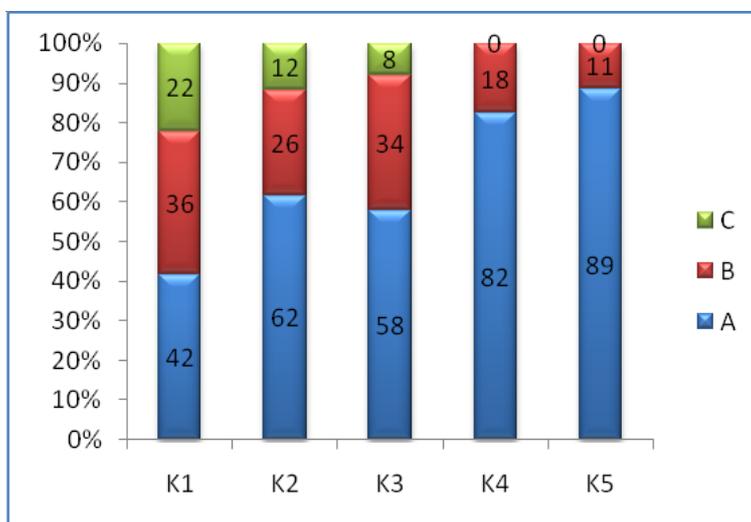
Hasil capaian akreditasi sekolah apabila dikategorikan dalam lima kuantil, maka persebaran sekolah yang terakreditasi kategori A masuk pada



Grafik 1 Kategori Sekolah per Kuantil



Garfik 2 Capaian Standar Nasional Pendidikan



Grafik 3 Distribusi Peringkat Akreditasi per Kuantil

kuantil 5. Sebaliknya, sekolah dengan akreditasi kategori C masuk pada kuantil 1. Artinya, bahwa hasil akreditasi A mencerminkan hasil prestasi siswa. Hal ini dapat dimaklumi, bahwa sekolah dengan kategori akreditasi A telah memiliki standar nasional pendidikan, bahkan sudah melewati standar minimal, sehingga apabila dilihat dari prestasi jelas prestasi yang dimiliki di atas rata-rata sekolah lainnya, bahkan sudah masuk dalam kategori sekolah unggulan.

Persebaran hasil akreditasi yang dilihat per kuantil terdapat dalam Grafik 3 menunjukkan persebaran perolehan akreditasi dengan kriteria A tersebar antara K1 sampai dengan K5 dengan persebaran sekolah antara 42% sampai dengan 89% sekolah. Data tersebut menunjukkan, bahwa

semakin tinggi kuantil semakin tinggi pula sekolah dengan perolehan akreditasi dengan kriteria A.

Ketercapaian Ujian Nasional

Perolehan nilai rata-rata UN IPA dan IPS berdasarkan data sekolah sampel secara berturut-turut dari tahun 2011-2013 mengalami penurunan. Hal ini diduga karena pada saat pelaksanaan UN terjadi perbedaan siswa, sehingga terjadi perbedaan setiap tahun. Kualitas guru dalam pelaksanaan proses belajar mengajar berbeda, sehingga menyebabkan hasil akhir belajar setiap tahun berbeda pula. Apabila semua standar nasional pendidikan dapat dipenuhi maka akan dapat memberikan kontribusi pada kecenderungan kenaikan prestasi belajar siswa.

Sumbangan Setiap Standar Nasional Pendidikan terhadap Hasil UN

Dalam mengukur sumbangan setiap Standar Pendidikan Nasional terhadap hasil UN, penghitungan dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda. Hal ini dipilih karena variabel bebas lebih dari satu. Hasil penghitungan regresi berganda dilakukan melalui pengujian, koefisien determinan, uji simultan regresi, dan uji parsial.

Koefisien Determinasi

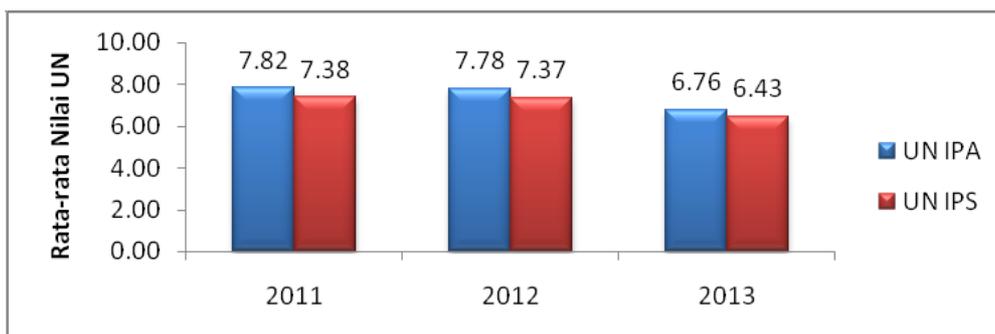
Berdasarkan perhitungan diperoleh koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.474. Hal ini menunjukkan besarnya keragaman (informasi) di dalam variabel Y (prestasi siswa) yang dapat diberikan oleh model regresi yang didapatkan dari (pencapaian Standar Nasional Pendidikan). Artinya, semakin besar nilai R^2 , semakin besar kontribusi pencapaian Standar Nasional Pendidikan terhadap prestasi siswa. Koefisien Determinasi dapat dilihat pada Tabel 1.

Sumbangan delapan standar nasional pendidikan terhadap prestasi belajar (UN) sebesar 22.5%. Hal ini berarti bahwa 77.5% keberhasilan prestasi belajar ditentukan oleh faktor lain baik internal maupun eksternal seperti motivasi, minat, latar belakang orang tua, lingkungan sekolah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, menjadi peran kepala sekolah dalam meningkatkan faktor

eksternal dan internal. UN merupakan salah satu upaya dalam pengendalian mutu pendidikan. Selain sebagai tolok ukur keberhasilan peserta didik dalam pembelajaran, UN juga menjadi acuan keberhasilan sekolah dalam mengendalikan proses kegiatan pembelajaran dan pendidikan dengan banyak melibatkan komponen dan unsur pendidikan yang terkait di dalamnya.

Instrumen guru bukan satu-satunya yang berperan di dalam menentukan keberhasilan belajar. Namun, siswa, lingkungan belajar, materi bahan ajar, metodologi pembelajaran, kelengkapan sarana prasarana, dan iklim sekolah menentukan keberhasilan peserta didik dalam menyerap, pengetahuan, dan keterampilan yang diajarkan guru di sekolah. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian mutu belajar agar arah belajar dan tujuannya selalu terfokus pada pencapaian maksimal untuk memenuhi pengembangan potensi bakat dan kapabilitas yang dimiliki secara utuh oleh peserta didik.

Tola (2009) menyebutkan bahwa pengendalian mutu pendidikan pada hakikatnya adalah pengendalian SDM yang dapat diketahui kompetensi pencapaiannya melalui sejumlah standar nasional pendidikan. Suatu lembaga pendidikan atau sekolah yang efektif harus memenuhi syarat delapan SNP sebagai acuan penjaminan mutu (*quality assurance, QA*),



Grafik 4 Kecenderungan Nilai UN (berdasarkan data sekolah sampel)

Tabel 1 Sumbangan Setiap Standar Nasional Pendidikan terhadap Hasil UN

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error Of The Estimate
1	.474 ^a	.225	.183	.75867

pencapaian kedelapan standar tersebut memerlukan persyaratan, validitas, dan reliabilitas yang cukup sebagai instrumen pengendalian mutu (*quality control, QC*). Perpaduan *QA* dan *QC* dalam melaksanakan tugas dan fungsi suatu lembaga pendidikan menghasilkan tingkat mutu lulusan yang optimal dan mampu bersaing secara lokal, regional, nasional dan internasional, sebagai acuan untuk memperbaiki mutu (*quality improvement, QI*).

Oleh karena itu, UN sebagai salah satu fungsi kontrol kualitas pendidikan adalah sesuatu yang tepat karena dengan diketahui nilai yang diperoleh setelah dilakukan ujian nasional dapat menggambarkan tingkat daya serap belajar siswa. Nilai yang diperoleh dapat digunakan oleh guru dan sekolah sebagai umpan balik perbaikan mutu belajar di sekolah. Hasil UN juga dapat digunakan sebagai pembandingan mutu pendidikan di sekolah satu dengan sekolah lainnya. Pada akhirnya pemerintah dapat membuat simpulan tentang mutu pendidikan di tingkat sekolah dan kabuapten/kota sebagai dasar dalam perbaikan mutu pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota.

Uji Simultan Model Regresi

Uji simultan (keseluruhan, bersama-sama) pada konsep regresi linier adalah pengujian mengenai apakah model regresi yang didapatkan benar-benar dapat diterima. Uji simultan bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh antara variabel-variabel bebas (pencapaian delapan Standar Nasional Pendidikan) terhadap variabel terikat Y (UN). Hasil uji simultan dapat dilihat dari Tabel 2.

Pengaruh kedelapan standar terhadap UN secara bersama-sama (simultan) signifikan secara statistik $p = 0,000$ ($p < 0,05$). Ini menunjukkan

bahwa delapan standar nasional pendidikan sangat berpengaruh terhadap capaian nilai UN.

Uji Parsial

Uji parsial digunakan untuk menguji apakah sebuah variabel bebas (Pencapaian delapan Standar Nasional Pendidikan) benar-benar memberikan kontribusi terhadap variabel terikat (UN). Dalam pengujian ini ingin diketahui apakah jika secara terpisah, suatu pencapaian setiap Standar Nasional Pendidikan masih memberikan kontribusi secara signifikan terhadap prestasi siswa. Hasil uji simultan dapat dilihat pada Tabel 3.

Dari delapan standar, jika diuji secara parsial (satu-persatu), yang berpengaruh signifikan secara statistik terhadap UN hanya standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK), $p = 0,044$ ($p < 0,05$). Artinya, bahwa semua standar memiliki pengaruh terhadap ketercapaian prestasi (UN) namun standar yang memiliki pengaruh secara signifikan adalah standar PTK. Oleh karena itu, Standar PTK memiliki peran yang strategis dalam peningkatan prestasi siswa. Hal tersebut karena guru yang dikatakan profesional adalah guru yang memiliki empat kompetensi (kompetensi profesionalisme, pedagogi, kepribadian, dan sosial) sehingga dengan kompetensi tersebut guru dapat berkinerja yang lebih baik. Bila digambarkan dalam bentuk konstelasi hubungan delapan standar terhadap prestasi siswa (UN) seperti pada Grafik 4.

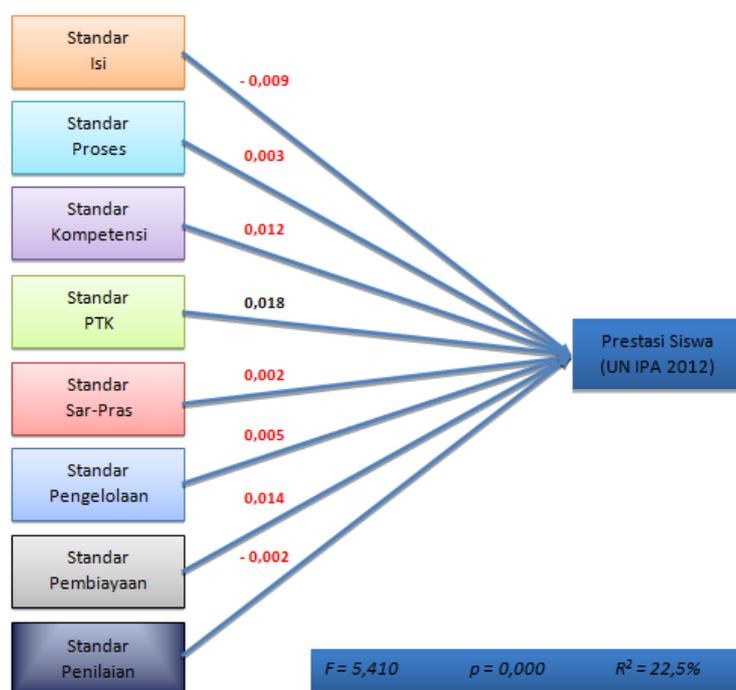
Berdasarkan uji tersebut semua standar memiliki kontribusi namun kontribusi yang paling besar adalah Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yangn tingkat signifikannya tinggi di banding dengan standar lainnya. Ini menunjukkan bahwa peran guru dalam pelaksanaan proses belajar mengajar sangat startegis. Dalam hal ini

Tabel 2 Pengaruh Kedelapan Standar terhadap UN secara Bersama-sama Anova^b

		Anova ^b				
Model		Sum Of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	24.913	8	3.114	5.410	.000 ^a
	Residual	85.762	149	.576		
	Total	110.675	157			

Tabel 3 Pengaruh Kedelapan Standar terhadap UN secara Parsial Coefficients^a

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	4.052	.776		5.218	.000
	NILAI AKREDITASI STANDAR ISI	-.009	.010	-.102	-.852	.395
	NILAI AKREDITASI STANDAR PROSES	.003	.008	.037	.350	.727
	NILAI AKREDITASI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	.012	.010	.166	1.254	.212
	NILAI AKREDITASI STANDAR PTK	.018	.009	.228	2.029	.044
	NILAI AKREDITASI STANDAR SARANA PRASARANA	.002	.008	.031	.240	.811
	NILAI AKREDITASI STANDAR PENGELOLAAN	.005	.011	.054	.450	.654
	NILAI AKREDITASI STANDAR PEMBIAYAAN	.014	.010	.144	1.422	.157
	NILAI AKREDITASI STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN	-.002	.008	-.017	-.198	.844



Grafik 4 Kontribusi antara 8 standar dengan hasil UN

guru yang berkualitas akan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Hasil evaluasi dari proses belajar yang dilakukan oleh pemerintah sebagai evaluasi pihak eksternal berupa Ujian Nasional.

Ujian Nasional adalah penilaian yang dilakukan pada akhir program pembelajaran di setiap satuan atau jenjang/tingkat SMP/MTs/SMPLB dan SMA/MA/SMK/SMALB, paket A/B/C. Hasil penilaian secara

nasional harus diinformasikan secara transparan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan pendidikan kepada masyarakat. Menurut Tola (2009) UN memiliki fungsi sebagai: 1) alat pengendali mutu lulusan agar sesuai dengan kualifikasi atau standar kompetensi yang telah ditetapkan; 2) alat untuk akuntabilitas kepada orang tua siswa dan masyarakat mengenai keberhasilan atau kekurangberhasilan program pendidikan serta untuk melaporkan kepada publik tentang kemajuan atau kemunduran prestasi akademik para lulusan satuan pendidikan dari tahun ke tahun; 3) bahan pertimbangan dalam seleksi dan penempatan masuk ke perguruan tinggi atau melamar pekerjaan; 4) salah satu bahan pertimbangan untuk memberikan sertifikasi kompetensi; dan 5) bahan pembinaan bagi sekolah/madrasah yang pencapaian UN nya masih rendah.

Seperti dikemukakan di atas bahwa rujukan setiap kali penilaian khususnya UN selalu berimbang pada efektivitas penyelenggaraan sekolah. Dengan demikian, ujian/penilaian bagi peserta didik dalam segala bentuknya jangan hanya dilihat dari sudut siswa. Sebaliknya, pantulan keberhasilan siswa dalam pelaksanaan UN harus dijadikan barometer kualitas dan efektivitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada taraf dan kadar tertentu. Kondisi inilah yang menjadi prasyarat bagi terciptanya sekolah yang efektif. Ronald Edmonds dalam Syafaruddin (2008) menegaskan bahwa gerakan sekolah efektif (*effective school movement*) ternyata diinspirasi dari pemikiran prestasi pelajar (keberhasilan siswa) yang tidak terlalu bervariasi dari segi status sosio ekonomi masing-masing. Menurut Edmonds karakteristik sekolah efektif harus memenuhi lima ciri, yaitu: 1) kepala sekolah memiliki kepemimpinan yang kuat, 2) harapan yang tinggi terhadap prestasi pelajar, 3) menekankan pada keterampilan dasar, 4) keteraturan dan atmosfer terkendali, dan 5) seringnya penilaian terhadap prestasi pelajar.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka UN memiliki harapan terhadap terciptanya efektivitas sekolah. Jadi, fungsi pengendalian mutu itu akan memiliki *multiplier effect* terhadap dimensi prestasi

siswa, kepemimpinan kepala sekolah, proses pembelajaran, iklim belajar, dan lingkungan sekolah yang kesemuanya menunjukkan keadaulatan sekolah sebagai pemangku dan pengembang sikap, ilmu pengetahuan, dan keterampilan yang berguna bagi masa depan siswa di kemudian hari.

Simpulan dan Saran

Simpulan

Ketercapaian standar nasional pendidikan menunjukkan bahwa dari delapan standar yang ada empat standar yang masih rendah yaitu standar sarana-prasarana 86,6%, standar proses 87,5%, standar kompetensi 87,5%, dan standar pendidik dan tenaga kependidikan 87,7%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar sekolah sampel capaian dari empat standar (standar sarana-prasarana, proses, kompetensi, dan pendidik dan tenaga kependidikan) tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan empat standar lainnya (standar isi, pengelolaan, biaya dan penilaian).

Selain itu, sumbangan delapan standar nasional pendidikan terhadap proses pembelajaran sebesar 22,5%. Hal ini berarti bahwa 77,5% keberhasilan proses pembelajaran ditentukan oleh faktor lain baik internal maupun eksternal seperti motivasi, minat, latar belakang orang tua, lingkungan sekolah, dan lain sebagainya. Pengaruh kedelapan standar terhadap UN secara bersama-sama (*simultan*) signifikan dengan data statistik $p=0,000$ ($p<0,05$). Ini menunjukkan bahwa delapan standar nasional pendidikan sangat berpengaruh terhadap capaian nilai UN. Dari kedelapan standar tersebut, jika diuji secara parsial (satu persatu), pengaruh secara signifikan pada hasil UN adalah berasal dari standar pendidik dan tenaga kependidikan (PTK), $p = 0,044$ ($p<0,05$). Artinya bahwa tujuh standar yang lainnya memiliki pengaruh tetapi tidak signifikan terhadap nilai UN. Hal ini menunjukkan bahwa standar PTK memiliki peran strategis dalam meningkatkan prestasi siswa. Namun, peran dari standar yang lain juga perlu diperhatikan untuk secara bersama-sama dalam meningkatkan prestasi siswa.

Saran

Berdasarkan simpulan di atas dapat disarankan sebagai berikut. Pertama, ketercapaian standar belum merata karena terdapat empat standar (standar sarana prasarana, standar proses, standar kompetensi dan standar PTK) yang masih rendah jika dibandingkan dengan standar lainnya. Hal ini perlu ada pemenuhan standar–standar yang masih rendah dengan cara diprioritaskan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dengan meningkatkan pemenuhan standar PTK maka akan dapat mendorong standar lainnya seperti standar isi, standar proses, standar penilaian dan standar kompetensi secara bersamaan. Oleh karena itu, sekolah dan dinas pendidikan harus melakukan pemenuhan kualifikasi pendidikan guru dan kesesuaian latar pendidikan dengan materi ajarnya. Demikian juga perlu meningkatkan empat kompetensi guru, yaitu kompetensi profesional, kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan guru maka pihak sekolah dapat memberikan dua alternatif kepada guru yaitu guru didorong untuk belajar dengan prakarsa sendiri, atau guru, diberikan beasiswa dari sekolah atau dicarikan beasiswa melalui pemerintah atau pihak swasta. Peningkatan kompetensi guru dilaksanakan melalui pembinaan dengan mengikutsertakan dalam diklat atau pihak sekolah melakukan program bimbingan sendiri untuk menghadirkan pakar untuk memberikan bimbingan. Pemenuhan standar sarana prasarana melalui penataan kualifikasi standar pengelola laboratorium (laboran), perpustakaan (pustakawan) dan melengkapi sarana belajar yang

masih belum terpenuhi seperti ruang laboratorium maupun perpustakaan sekolah. Standar ini dapat dipenuhi dengan dua alternatif yaitu sekolah mengajukan kekurangan sarana prasarana belajar kepada dinas pendidikan maupun bekerja sama dengan pihak swasta dengan cara tidak mengikat untuk pemenuhan ruang laboratorium maupun pustakawan.

Kedua, setiap standar mempunyai kontribusi dalam pencapaian prestasi belajar namun besaran kontribusi masih belum maksimal. Untuk meningkatkan kontribusi delapan standar maka yang perlu mendapatkan peningkatan mutu adalah tiga standar, yaitu standar PTK dengan penekanan pada peningkatan profesionalisme guru, pemenuhan standar sarana-prasarana dan peningkatan standar pengelolaan dengan memperkuat manajemen sekolah yang efektif. Apabila standar tersebut dapat dicapai maka dengan kemampuan kepala sekolah dalam pengelolaan akan menggerakkan potensi-potensi yang masih belum tergalai seperti faktor internal dan eksternal yang mempunyai kontribusi dalam prestasi siswa. Potensi tersebut seperti bakat pada siswa, karakter siswa serta keterlibatan orang tua siswa dalam mengawasi putra dan puterinya. Untuk menggerakkan potensi tersebut kepala sekolah perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap organisasi sekolah dengan melihat kekuatan dan kelemahan organisasi sekolah yang dipimpinnya, sehingga dapat mendeteksi secara dini apa yang menjadi kelemahan organisasi sekolah, untuk selanjutnya dilakukan perbaikan dengan mengembangkan potensi yang ada di sekolah.

Pustaka Acuan

- Arikunto, S. 2010. *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Burden, P. R & Bayrd, D. 1999. *Effective Teaching*, Second Edition, Boston: Allyn and Bacon.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor, 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah*, Jakarta: Departemen

Pendidikan Nasional.

Djaali, M & Ramly. 2000. *Pengukuran dalam Bidang Pendidikan*. Jakarta: Program Pascasarjana UNJ.

Mardapi, Dj. 2003. *Desain dan Penilaian Pembelajaran Mahasiswa*. Makalah Disajikan dalam Lokakarya Sistem Jaminan Mutu Proses Pembelajaran tanggal 19 Juni 2003 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Mulyasa, E. 2010. *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.

Rue. L. W. & Byars, L L. 2000. *Management, Skill and Application*. Boston: McGraw-Hill.

Robbins, S. P. & Coulter, M. 2009. *Management, Tenth Edition*. London: Pearson Education Ltd.

Sudrajat, A. 2010 <https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2010/05/13/standar-nasional-pendidikan/> diakses tanggal 14 Mei 2013.

Tilaar, H.A.R. 2006. *Standarisasi Pendidikan Nasional Suatu Tinjauan Kritis*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Tola, B. 2009. *Penjaminan, Pengendalian, dan Perbaikan Mutu Pendidikan*. Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan. 2(4) 2009 hlm 101-109.

Widyoko, S.E.P. 2007. *Pengembangan Model Evaluasi Pembelajaran IPS SMP*. Yogyakarta: PPS UNY.

United Nations Development Programme. 2013. <http://www.mitrainvestor.com/blog/2013/03/18/human-development-index-Indonesia-mor-121-tingkat-dunia/>. "Human Development Index Indonesia Nomor 121 Tingkat Dunia". Posted on 18 March 2013. diakses 28 September 2014.